

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uji pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki korelasi positif dan signifikan dengan PDRB berarti bahwa semakin tinggi PAD, PDRB juga akan meningkat dan sebaliknya. Jika terjadi penurunan PAD, PDRB juga akan mengalami penurunan.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PDRB. Ini berarti, peningkatan DAU tidak berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan mungkin berpotensi menurunkan PDRB. Namun, penurunan ini mengartikan ada beberapa faktor lainnya yang lebih dominan mempengaruhi PDRB.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) secara positif dan signifikan mempengaruhi PDRB. Artinya, semakin besar nilai DAK, semakin tinggi juga peningkatan terhadap nilai dari PDRB. DAK memiliki peranan yang sangat penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Kenaikan nilai DAK dapat memperkuat investasi di sektor infrastruktur dan pendidikan, sehingga dapat memacu meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
4. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan tidak signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan PDRB. Ini berarti, Meskipun DBH dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, dampaknya tidak begitu besar. Faktor lain seperti kebijakan pemerintah daerah dan kondisi ekonomi nasional juga berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut beberapa implikasi dan rekomendasi yang dapat ditarik untuk mengatasi permasalahan dalam konteks penelitian ini:

1. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi ekonomi dan meningkatkan PAD untuk meraih kemandirian finansial dan mendorong pembangunan. Peningkatan PAD kunci memajukan arus barang dan jasa, mendanai infrastruktur, dan memajukan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah daerah perlu fokuskan alokasi DAU (Dana Alokasi Umum) pada sektor-sektor unggulan hal ini bertujuan untuk menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi diharapkan dapat meningkatkan arus barang dan jasa di Sumatera Barat.
3. Pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan anggaran dengan meniru praktik tim pengawas daerah lain. Tim ini efektif dalam memastikan penggunaan dana yang tepat dan sesuai tujuan. Sebagai contoh, model pengawasan penyerapan anggaran di Jakarta yang diterapkan oleh pemerintah provinsi bisa dijadikan sebagai rujukan dalam membangun mekanisme pengawasan anggaran yang efisien dan efektif.
4. Pemerintah pusat perlu memberikan pendampingan teknis kepada daerah agar pengelolaan keuangan daerah lebih baik. Ini penting karena peraturan sering berubah, kapasitas daerah berbeda-beda, dan kebijakan pusat dan daerah harus sinkron. Pendampingan ini bisa berupa pelatihan, konsultasi, atau bantuan teknis lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, akuntabilitas, dan percepatan pembangunan di daerah.